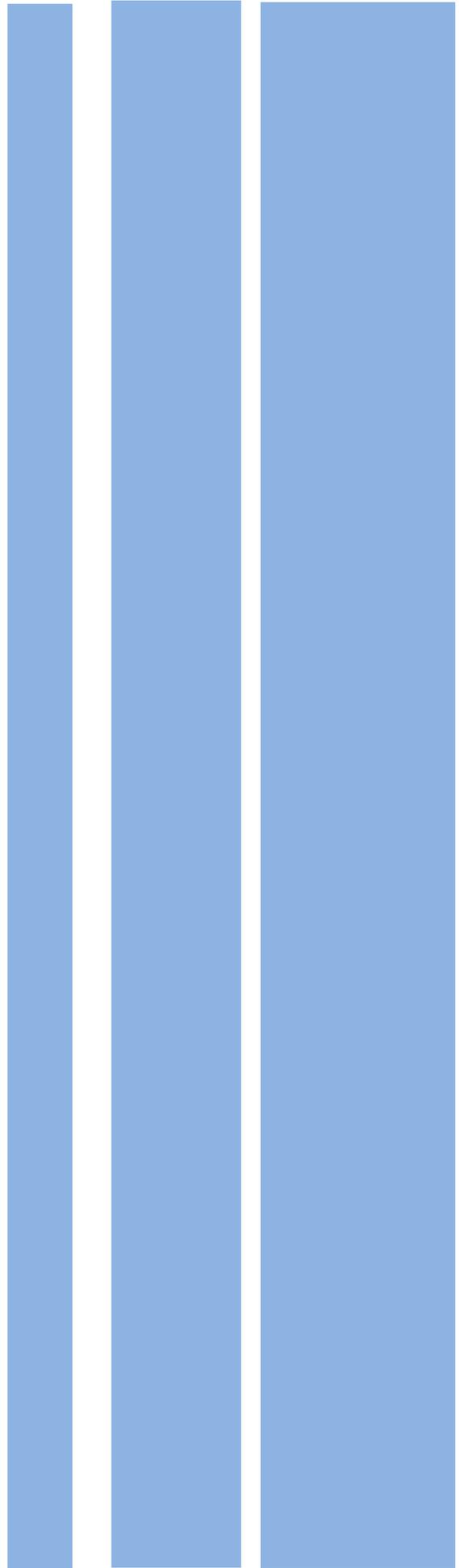


KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA PAPUA BARAT
UNTUK PERIODE AUDITED 2023
LAPORAN KEUANGAN UAKPA W
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
013.10.33.00



Jln.Brigjen (Purn) Abraham O.Atururi
Manokwari, Papua Barat

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai PenggunAnggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Manokwari, 13 Mei 2024

Kepala Kantor Wilayah



Piet Bulorsyom

NIP. 96512271996101001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Pernyataan Tanggung Jawab	3
Ringkasan	4
I. Laporan Realisasi Anggaran	6
II. Neraca	7
III. Laporan Operasional	8
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	9
V. Catatan atas Laporan Keuangan	10
A. Penjelasan Umum	10
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	20
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	28
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	43
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	50
F. Pengungkapan Penting Lainnya	54



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH PAPUA BARAT
JLN. BRIGJEN O. ATURURI ARFAI

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan tingkat Wilayah selaku UAPPA-W yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggungjawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi serta kinerja keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Manokwari, 13 Mei 2024

Kepala Kantor Wilayah



Her Eukorsyom

NP 196512271996101001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Papua Barat Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2023 adalah sebesar Rp0 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2023 adalah sebesar Rp763.050.559 atau mencapai 99,26 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp768.741.000.

NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023. Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp0 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp0; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp0; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp753.050.559 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp753.050.559. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0 dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp753.050.559.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp0 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp753.050.559 ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp753.050.559 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp0.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Cat.	Th 2023				Th 2022
		Anggaran	Realisasi	Realisasi Diatas (Dibawah)	%	Realisasi
Pendapatan Negara dan Hibah	B.1					
Penerimaan Perpajakan	B.2	0	0	0	0,00	0
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.3	0	0	0	0,00	0
Penerimaan Hibah	B.4	0	0	0	0,00	0
Jumlah Pendapatan dan Hibah		0	0	0	0,00	0
Belanja	B.5					
Belanja Pegawai	B.6	0	0	0	0,00	0
Belanja Barang	B.7	758.741.000	753.050.559	(5.690.441)	72,19	437.337.600
Belanja Modal	B.8	10.000.000	10.000.000	0	0,00	10.000.000
Belanja Bantuan Sosial	B.9	0	0	0	0,00	0
Jumlah Belanja		768.741.000	763.050.559	(5.690.441)	99,26	447.337.600

II. NERACA**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT
NERACA****PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022***(Dalam Rupiah)*

Uraian	Catatan	2023	2022
ASET			
ASET LANCAR	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	0	0
Kas di Bendahara Penerimaan	C.1.2	0	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.3	0	0
Piutang Perpajakan	C.1.4	0	0
Piutang Bukan Pajak	C.1.5	0	0
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.1.6	0	0
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.1.7	0	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Pendek	C.1.8	0	0
Beban Dibayar di Muka	C.1.9	0	0
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.1.10	0	0
Persediaan	C.1.11	0	0
JUMLAH ASET LANCAR		0	0
ASET TETAP	C.2		
Tanah	C.2.1	0	0
Peralatan dan Mesin	C.2.2	0	0
Gedung dan Bangunan	C.2.3	0	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2.4	0	0
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	0	0
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.6	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.7	0	0
JUMLAH ASET TETAP		0	0
PIUTANG JANGKA PANJANG	C.3		
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.3.1	0	0
Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	C.3.2	0	0
Piutang Jangka Panjang Lainnya	C.3.3	0	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	C.3.4	0	0
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG		0	0
ASET LAINNYA	C.4		
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	C.4.1	0	0
Aset Tak Berwujud	C.4.2	0	0
Aset Lain-lain	C.4.3	0	0
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4.4	0	0
JUMLAH ASET LAINNYA		0	0
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.5		
Uang Muka dari KPPN	C.5.1	0	0
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5.2	0	0
Pendapatan Diterima Dimuka	C.5.3	0	0
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.5.4	0	0
Utang yang Belum Ditagihkan	C.5.5	0	0
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.5.6	0	0
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		0	0
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	C.6		
Kewajiban Konsesi Jasa	C.6.1	0	0
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		0	0
JUMLAH KEWAJIBAN		0	0
EKUITAS			
Ekuitas	C.7	0	0
JUMLAH EKUITAS		0	0
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		0	0

III. LAPORAN OPERASIONAL
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Cat.	2023	2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Perpajakan	D.1	0	0
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.2	0	0
Pendapatan Hibah	D.3	0	0
JUMLAH PENDAPATAN		0	0
BEBAN			
Beban Pegawai	D.4	0	0
Beban Persediaan	D.5	0	0
Beban Barang dan Jasa	D.6	439.835.159	244.203.000
Beban Pemeliharaan	D.7	0	0
Beban Perjalanan Dinas	D.8	313.215.400	193.134.600
Beban Barang untuk Diserahkan ke Masyarakat	D.9	0	0
Beban Bantuan Sosial	D.10	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.11	0	0
Beban Penyusutan Piutang Tak Tertagih	D.12	0	0
JUMLAH BEBAN		753.050.559	437.337.600
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(753.050.559)	(437.337.600)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang			
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11	0	0
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(753.050.559)	(437.337.600)
POS LUAR BIASA			
Pendapatan Luar Biasa	D.12	0	0
Beban Luar Biasa		0	0
JUMLAH POS LUAR BIASA		0	0
SURPLUS (DEFISIT) LO		(753.050.559)	(437.337.600)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2023	2022
EKUITAS AWAL	E.1	0	0
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(753.050.559)	(437.337.600)
DAMPAK AKUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	E.3	0	0
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS			9
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.4.1	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.4.2	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	E.4.3	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.4.4	0	0
JUMLAH KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	753.050.559	437.337.600
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		0	0
EKUITAS AKHIR	E.6	0	0

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Papua Barat

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana Strategis*

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sesuai dengan Peraturan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan No. 2005/BALAP.007/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat mempunyai tugas dan fungsi dalam melakukan koordinasi di bidang bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah dengan cakupan Wilayah Papua Barat. Melalui peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat diharapkan kualitas Laporan Keuangan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan Akuntabel, Akurat, dan Transparan.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat melakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut

1. Menyelenggarakan usaha-usaha yang berkelanjutan berkaitan dengan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual.
2. Membina secara efektif Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi berbasis akrual yang diimplementasikan.
3. Mengembangkan sistem informasi yang andal dan terpercaya.
4. Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan kepada para pemangku kepentingan.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Papua Barat. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Basis Akuntansi

A.3 Basis Akuntansi

Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Papua Barat menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Papua Barat dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konsekuensi-konsekuensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Papua Barat. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Papua Barat adalah sebagai berikut:

Pendapatan- LRA

(1) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan LO

(2) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode sewa.
 - c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber.

Belanja

(3) Belanja

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa,
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

Aset

5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca,
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan Ganti Rugi, apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal,
 - c. Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan
 - a. harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b. harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c. harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya, kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset LAIN-LAIN pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

- a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
 - Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
 - Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tatel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya,
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil, sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2021 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Software	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 tahun

- Aset LAIN-LAIN berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Penjelasan atas
Pos Laporan
Realisasi
Anggaran

Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Papua Barat memperoleh alokasi anggaran Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 806.228.000. Selama tahun 2023, dilakukan revisi atas DIPA Awal Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Papua Barat yang disebabkan adanya *Refocussing*, penghematan belanja pemerintah serta realokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Anggaran awal dan anggaran setelah revisi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Rincian Perubahan DIPA
Tahun Anggaran 2023

Uraian	Tahun Anggaran 2023	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Perpajakan	0	0
Pendapatan PNB	0	0
Pendapatan Hibah	0	0
Jumlah Pendapatan	0	0
Belanja		
Belanja Pegawai	0	0
Belanja Barang	796.228.000	758.741.000
Belanja Modal	10.000.000	10.000.000
Belanja Bantuan Sosial	0	0
Jumlah Belanja	806.228.000	768.741.000

B.1 Pendapatan

Realisasi
Pendapatan Rp0

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Pendapatan Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Papua Barat terdiri dari Pendapatan Jasa berasal dari pelaksanaan tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan kebijakan Hukum atau OBH kepada masyarakat dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan (dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2023		%
	Anggaran	Realisasi	
Pendapatan Perpajakan	0	0	0,00
Pendapatan Penerimaan Bukan Pajak Negara	0	0	0,00

Pendapatan Hibah	0	0	0,00
Jumlah	0	0	0,00

Realisasi Pendapatan Jasa TA 2023 tidak mengalami perubahan dibandingkan realisasi TA 2022. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya pelayanan jasa bantuan hukum sehubungan dengan kewajiban penerapan akuntansi berbasis akrual di tahun 2022. Selain itu tidak terdapat kenaikan Pendapatan Lain-lain dari Rp.0 menjadi Rp.0 atau sebesar 0 % dibandingkan dengan tahun anggaran yang lalu. Hal ini berasal dari pendapatan jasa lembaga keuangan dan pengembalian belanja pegawai serta belanja lainnya.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2023 dan 2022
(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
Pendapatan Perpajakan	0	0	0,00
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	0	0,00
Pendapatan Hibah	0	0	0,00
Jumlah	0	0	0,00

B.2 Pendapatan Perpajakan

*Pendapatan
Perpajakan Rp0*

Realisasi Pendapatan Perpajakan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Perbandingan Realisasi Pendapatan Perpajakan
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
Jumlah Pendapatan Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Pendapatan Perpajakan	0	0	0,00
Jumlah Pendapatan	0	0	0,00

B.3 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

*Pendapatan PNBP
Rp0*

Realisasi Pendapatan PNBP untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Perbandingan Realisasi Pendapatan PNBP
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
Jumlah Pendapatan Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Pendapatan PNBP	0	0	0,00

Jumlah Pendapatan	0	0	0,00
-------------------	---	---	------

Pendapatan Hibah Rp0

B.4 Pendapatan Hibah

Realisasi Pendapatan Hibah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Perbandingan Realisasi Pendapatan Hibah
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
Jumlah Pendapatan Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Pendapatan Hibah	0	0	0,00
Jumlah Pendapatan	0	0	0,00

Realisasi Belanja Rp763.050.559

B.5 Belanja

Realisasi Belanja Kantor Akuntansi pada TA 2023 adalah sebesar Rp763.050.559 atau 91,81% dari anggaran belanja sebesar Rp768.741.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2023
(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	0	0	0,00
Belanja Barang	758.741.000	753.050.559	99,25
Belanja Modal	10.000.000	10.000.000	100,00
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0,00
Total Belanja Kotor	768.741.000	763.050.559	99,26
Pengembalian Belanja Pegawai	-	0	-
Pengembalian Belanja Barang	-	0	-
Pengembalian Belanja Modal	-	0	-
Pengembalian Belanja Bantuan Sosial	-	0	-
Jumlah	768.741.000	763.050.559	99,26

Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 72,19 persen dibandingkan dengan periode yang berakhir 31 Desember 2022. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Anggaran Belanja Modal yang direalisasikan untuk pengembangan ilmu di bidang hukum baik di masyarakat maupun untuk pengembangan ilmu pada pegawai Kementerian Hukum dan HAM dibidang hukum.
2. Meningkatnya Belanja Barang untuk mendukung aktivitas perkantoran dan pemeliharaan atas aset yang dimiliki agar

tetap dapat dalam kondisi baik sehingga pelayanan dan aktivitas perkantoran dapat berjalan dengan baik.

Perbandingan Realisasi Belanja
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
Belanja Pegawai	0	0	0,00
Belanja Barang	753.050.559	437.337.600	72,19
Belanja Modal	10.000.000	10.000.000	0,00
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0,00
Jumlah	763.050.559	447.337.600	70,58

B.6 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai
Rp0

Realisasi Belanja Pegawai pada satuan kerja 667779 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2023 pada belanja pegawai satuan kerja 667779 tidak ada dikarenakan anggaran belanja pegawai terdapat pada dipa 667772 sehingga tidak terdapat realisasi belanja pegawai pada satuan kerja 667779 dari TA 2022 dan 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Pegawai	0	0	0,00
Jumlah Belanja	0	0	0,00

B.7 Belanja Barang

Belanja Barang
Rp753.050.559

Realisasi Belanja Barang yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp753.050.559 dan Rp437.337.600. Realisasi Belanja Barang TA 2023 mengalami kenaikan 72,19% dari Realisasi Belanja Barang TA 2022. Hal ini disebabkan, antara lain:

1. Peningkatan belanja Jasa Kegiatan Hukum,
2. Peningkatan Belanja Perjalanan Dinas pada satuan kerja ini untuk kegiatan pelayanan hukum pada instansi pemerintah lainnya untuk kepentingan masyarakat di wilayah papua barat dan sekitarnya.
3. Peningkatan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat sebagai wujud perhatian pemerintah.

Perbandingan Realisasi Belanja Barang
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
Belanja Barang Non Operasional	63.958.000	236.666.000	(72,98)
Belanja Jasa	375.877.159	7.537.000	4887,09
Belanja Perjalanan Dinas	313.215.400	193.134.600	62,17
Jumlah Belanja Kotor	753.050.559	437.337.600	72,19
Pengembalian Belanja Barang	0	0	0,00
Jumlah Belanja	753.050.559	437.337.600	72,19

B.8 Belanja Modal

Belanja Modal Rp10.000.000

Realisasi Belanja Modal untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp10.000.000 dan Rp10.000.000. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal pada TA 2023 mengalami persamaan sebesar 0,00% dibandingkan TA 2022 dikarenakan anggaran tersebut dialokasikan pada pembelian buku monografi hukum dan untuk peningkatan fasilitas informasi hukum untuk menunjang pelaksanaan tugas Satker.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0,00
Belanja Modal Lainnya	10.000.000	10.000.000	0,00
Jumlah Belanja Kotor	10.000.000	10.000.000	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja Modal	10.000.000	10.000.000	0,00

B.8.1 Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah Rp0

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2023 tidak mengalami kenaikan sebesar 0,00 persen dibandingkan TA 2022, Hal ini disebabkan karena Belanja Modal Tanah di bebaskan pada DIPA Satuan Kerja 667772.

Perbandingan Realisasi Belanja Tanah
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja Modal	0	0	0,00

B.8.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp0

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 adalah sebesar Rp0, tidak mengalami kenaikan sebesar 0,00 persen bila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp0. Hal ini disebabkan Belanja Modal Peralatan dan mesin dibebankan pada DIPA Satuan Kerja 667772.

Perbandingan Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja Modal	0	0	0,00

B.8.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp0

Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi Belanja Modal TA 2023 tidak mengalami kenaikan sebesar 0,00 persen dibandingkan Realisasi TA 2022 dikarenakan Belanja Modal dan Gedung dibebankan pada DIPA 667772.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja Modal	0	0	0,00

B.8.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp0

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi Belanja Modal TA 2023 tidak mengalami kenaikan sebesar 0,00 persen dibandingkan Realisasi TA 2022 dikarenakan pada Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dibebankan pada DIPA Satuan Kerja 667772.

Perbandingan Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja Modal	0	0	0,00

B.8.5 Belanja Modal Lainnya

Belanja Modal Lainnya Rp10.000.000

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp10.000.000 dan Rp10.000.000. Realisasi tersebut pada TA 2023 tidak mengalami kenaikan sebesar 0,00 persen dibandingkan TA 2022. Hal ini disebabkan anggaran tersebut hanya digunakan untuk pembelian buku monografi hukum.

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
Belanja Modal Lainnya	10.000.000	10.000.000	0,00
Jumlah Belanja Kotor	10.000.000	10.000.000	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja Modal	10.000.000	10.000.000	0,00

B.9 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial Rp0

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Realisasi pada DIPA tersebut pada TA 2023 tidak mengalami kenaikan sebesar 0,00 persen dibandingkan TA 2022 dikarenakan pada Anggaran satuan ke.

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Bantuan Sosial	0	0	0,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial	0	0	0,00

PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Aset Lancar Rp0

C.1. Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Papua Barat per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Kas di Bendahara

Pengeluaran

Rp0

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola, dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal Neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Papua Barat per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel C.1.1

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun 2023	Tahun 2022
Uang Tunai	0	0
Bank Mandiri No. Rek. VA. 8100126677791000	0	0
Jumlah	0	0

Kas di Bendahara

Penerimaan

Rp0

C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0, yang meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Tabel C.1.2

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan TA 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun 2023	Tahun 2022
Uang Tunai	0	0
Bank Mandiri No. Rek.	0	0
Jumlah	0	0

Kas Lainnya dan

Setara Kas

Rp0

C.1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Tabel C.1.3
Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun 2023	Tahun 2022
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0	0
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	0	0
Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah	0	0
Kas Lainnya di K/L Dana Kelolaan LPP RRI/TVRI	0	0
Kas Lainnya dari Reklasifikasi Kas Besi	0	0
Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan	0	0
Jumlah	0	0

Piutang Perpajakan
Rp0

C.1.4. Piutang Perpajakan

Piutang Perpajakan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel C.1.4.
Rincian Piutang Perpajakan TA 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Jumlah	0	0

Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir tahun anggaran per tanggal Neraca.

Piutang Bukan Pajak
Rp0

C.1.5. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Piutang Bukan Pajak TA 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Piutang PNB	0	0
Piutang Lainnya	0	0
Jumlah	0	0

Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir tahun anggaran per tanggal Neraca.

Bagian Lancar
Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/

C.1.6. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan

Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31

Tuntutan Ganti Rugi
(TP/TGR)
Rp0

Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel C.1.6.

Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1	NIHIL		

Bagian Lancar
Tagihan Penjualan
Angsuran
Rp0

C.1.7. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Bagian Lancar Tagihan Tagihan Penjualan Angsuran merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Rincian Bagian Lancar TPA untuk masing-masing Satker disajikan sebagai berikut:

Tabel C.1.7.

Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1	NIHIL		

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih –
Piutang Jk. Pendek
Rp0

C.1.8. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Pendek

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Papua Barat per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0, yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Jangka Pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang masing-masing debitor.

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih berdasarkan kategori piutang per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel C.1.8

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jk. Pendek

(dalam rupiah)

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Lancar	0	0,5%	0
Kurang Lancar	0	10%	0
Diragukan	0	50%	0
Macet	0	100%	0
Jumlah	0		0
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	0	0,5%	0

Kurang Lancar	0	10%	0
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	0		0
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	0	0,5%	0
Kurang Lancar	0	10%	0
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	0		0
Bagian Lancar TPA			
Lancar	0	0,5%	0
Kurang Lancar	0	10%	0
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	0		0
Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0		0

Beban Dibayar di Muka
Rp0

C.1.9. Beban Dibayar di Muka

Beban Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Beban Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Rincian Beban Dibayar di Muka Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Papua Barat per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel C.1.9

Rincian Beban Dibayar di Muka TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Pembayaran Internet	0	0
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	0	0
Pembayaran Sewa Gedung Kantor	0	0
Jumlah	0	0

Pendapatan yang Masih Harus Diterima
Rp0

C.1.10. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya. Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Papua Barat per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel C.1.10

Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima

TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Jenis	Tahun 2023	Tahun 2022
Pendapatan Jasa Pelatihan	0	0
Pendapatan Jasa Pelayanan dan Pendidikan	0	0
Jumlah	0	0

Persediaan

Rp0

C.1.10. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel C.1.10.

Rincian Persediaan TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Persediaan	Tahun 2023	Tahun 2022
Barang Konsumsi	0	0
Amunisi	0	0
Barang untuk Pemeliharaan	0	0
Suku Cadang	0	0
Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0	0
Persediaan Lainnya	0	0
Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial	0	0
Jumlah	0	0

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan pada satuan kerja ini tidak terdapat anggaran tersebut karna anggaran tersebut dibebankan pada dipa satuan kerja 667772.

Aset Tetap

Rp0

C.2. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Papua Barat per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Papua Barat berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya.

Tanah
Rp0

C.2.1. Tanah

Tanah yang dimiliki oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Papua Barat per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Mutasi Tanah

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2022	0
Pembelian	0
Revaluasi Aset	(0)
Penghapusan	-
Saldo Per 31 Desember 2023	0
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	-
Nilai Buku Per 31 Desember 2023	0

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel C.2.1
Rincian Tanah TA 2023

(dalam rupiah)

No.	Luas	Lokasi	Nilai
1	0 m ²	Jl. Brigjen O.Atururi Papua Barat - Arfai	0
Jumlah			0

Tanah tersebut dicatat pada satuan Kerja 667772.

Peralatan dan Mesin
Rp0

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Papua Barat per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel C.2.2
Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2022	0
Pembelian	0
Hibah	0
Transfer Masuk	0
Koreksi Tambah	0
Penghentian aset dari penggunaan	(0)
Saldo Per 31 Desember 2023	0
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	0
Nilai Buku Per 31 Desember 2023	0

Mutasi tambah peralatan dan mesin antara lain adalah sebagai berikut:

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin dan Akumulasi Penyusutannya per 31 Desember 2023 tidak terdapat pada satuan kerja 667779 dan hanya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan Satuan Kerja 667772.

Gedung dan
Bangunan
Rp0

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel C.2.3

Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan TA 2023

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2022	0
Pembangunan Gedung	0
Mutasi Kurang:	-
Saldo Per 31 Desember 2023	0
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	0
Nilai Buku Per 31 Desember 2023	0

Rincian Gedung dan Bangunan beserta Akumulasi Penyusutannya per 31 Desember 2023 tidak terdapat pada satuan kerja 667779 dan hanya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan Satuan Kerja 667772.

Jalan, Irigasi dan
Jaringan
Rp0

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel C.2.4.

Rincian Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2022	0
Pengembangan Jaringan Teknologi Informasi	0
Koreksi Pencatatan	-
Saldo Per 31 Desember 2023	0
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	0
Nilai Buku Per 31 Desember 2023	0

Mutasi tambah:

Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan beserta Akumulasi Penyusutannya per 31 Desember 2023 tidak terdapat pada satuan kerja 667779 dan hanya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan Satuan Kerja 667772.

Aset Tetap Lainnya
Rp0

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel C.2.5.
Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya
(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2022	0
-	-
-	-
Saldo Per 31 Desember 2022	0
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	0
Nilai Buku Per 31 Desember 2022	0

Rincian Aset Tetap Lainnya dan Akumulasi disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp0

C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 yang merupakan pembangunan gedung dan bangunan tempat kerja terdapat pada DIPA Satuan Kerja 667772 dan tidak melekat pada dipa 667779.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp0

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 dikarenakan Akumulasi Penyusutan tersebut terdapat pada DIPA 667772.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023.

Tabel C.7.2
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam rupiah)

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	0	0	0
2.	Gedung dan Bangunan	0	0	0
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
4.	Aset Tetap Lainnya	0	0	0

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Piutang Jangka Panjang Rp0

C.3. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Papua Barat per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 dikarenakan pembebanan anggaran tersebut pada DIPA Satuan Kerja 667772.

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Piutang Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi
(TP/TGR)
Rp0

C.3.1. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Papua Barat per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 dikarenakan pada satuan kerja 667779 tidak terdapat Piutang TP/TGR. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan TP/TGR untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Tabel C.3.1

Rincian Piutang Tagihan TP/TGR TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.	Tn.	0	-
2.	Ny.	-	0

Tagihan Penjualan
Angsuran Rp0

C.3.2. Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, berupa penjualan aset tetap yang pembayarannya diselesaikan setelah dua belas bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian TPA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Tabel C.3.2

Rincian Piutang TPA TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.	Tn.	0	0
2.	Ny.	0	-

Piutang Jangka
Panjang Lainnya Rp0

C.3.3. Piutang Jangka Panjang Lainnya

Saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Rincian Piutang Jangka Panjang Lainnya untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Tabel C.3.3

Rincian Piutang Jangka Panjang Lainnya TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.	Tn.	0	0
2.	Ny.	0	-

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih -

C.3.3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham

Piutang Jangka Panjang Rp0

Papua Barat per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) adalah sebagai berikut.

*Tabel C.3.3
Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jk. Panjang
TA 2023*

(dalam rupiah)

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	0	0,5%	0
Kurang Lancar	0	10%	0
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	0		0
Tagihan TPA			
Lancar	0	0,5%	0
Kurang Lancar	0	10%	0
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	0		0
Piutang Jangka Panjang Lainnya			
Lancar	0	0,5%	0
Kurang Lancar	0	10%	0
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	0		0
Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0		0

Aset Lainnya Rp0

C.4. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Papua Barat per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Aset Lainnya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Papua Barat terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Aset LAIN-LAIN.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga Rp0

C.4.2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Nilai perolehan Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga digunakan untuk mencatat perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.. Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kantor

Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Papua Barat berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor yang dibebankan pada DIPA Satuan Kerja 667772. Adapun mutasi transaksi Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut.

Tabel C.4.2

Rincian Mutasi Kemitraan dengan Pihak Ketiga

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2022	0
Pembelian	0
Saldo Per 31 Desember 2023	0
Amortisasi s.d. 31 Desember 2023	0
Nilai Buku Per 31 Desember 2023	0

Mutasi tambah:

- Pembelian berupa aplikasi penatausahaan PNBP senilai Rp 0.
- Penambahan fitur pada Aplikasi Akuntansi Terpadu senilai Rp 0.

Rincian Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel C.4.2

Rincian Kemitraan dengan Pihak Ketiga TA 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Nilai
1.	-	0
2.	-	0

Aset Tak Berwujud

Rp0

C.4.1. Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Adapun mutasi transaksi Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut.

Tabel C.4.1

Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2022	0
Pembelian	0
Saldo Per 31 Desember 2023	0
Amortisasi s.d. 31 Desember 2023	0
Nilai Buku Per 31 Desember 2023	0

Mutasi tambah:

Pembelian berupa aplikasi penatausahaan PNBP senilai Rp0.

Penambahan fitur pada Aplikasi Akuntansi Terpadu senilai Rp0.

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel C.4.1
Rincian Aset Tak Berwujud TA 2023
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Nilai
1.	-	0
2.	-	0

Aset LAIN-LAIN
Rp0

C.4.2. Aset LAIN-LAIN

Aset LAIN-LAIN per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp0 dan Rp0. Aset LAIN-LAIN berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Papua Barat.

Adapun mutasi Aset LAIN-LAIN adalah sebagai berikut:

Tabel C.4.2
Rincian Mutasi Aset LAIN-LAIN
(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2021	0
Reklasifikasi dari Aset Tetap	0
Penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
Penghapusan BMN	(0)
Saldo Per 31 Desember 2022	0
Amortisasi s.d. 31 Desember 2022	0
Nilai Buku Per 31 Desember 2022	0

Rincian Aset LAIN-LAIN berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya Rp0

C.4.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel C.4.3
Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset
Lainnya TA 2023

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
A.	Aset Tak Berwujud			
	Jumlah	0	0	0
B.	Aset LAIN-LAIN			
	Jumlah	0	0	0
	Total	0	0	0

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Kewajiban Jangka
Pendek Rp 0

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban Jangka Pendek Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Papua Barat per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Utang Muka dari
KPPN Rp0

C.5.1. Utang Muka dari KPPN

Utang Muka dari KPPN per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada Pihak
Ketiga Rp0

C.5.2. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Papua Barat per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel C.5.2

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga TA 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1.	Pendapatan Jasa Giro yang belum disetor	0
2.	Potongan Pajak yang belum disetor	0
3.	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0
Total		0

Pendapatan Diterima
di Muka Rp0

C.5.3. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBPNP.

Tabel C.5.3

Rincian Pendapatan Diterima di Muka TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	2023	2022
Jumlah	0	0

Beban yang Masih
Harus Dibayar Rp0

C.5.4. Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel C.5.4
Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	2023	2022
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	0
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	0
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	0	0
Belanja Bantuan Sosial yang Masih Harus Dibayar	0	0
Jumlah	0	0

Utang yang Belum Ditagihkan Rp0

C.5.5. Utang yang Belum Ditagihkan

Utang yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Tabel C.5.5.

Rincian Utang yang Belum Ditagihkan TA 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

Uraian	2023	2022
Jumlah	0	0

Utang Jangka Pendek Lainnya Rp0

C.5.6. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Tabel C.5.6

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya TA 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

Uraian	2023	2022
Jumlah	0	0

Kewajiban Jangka Panjang Rp 0

C.6. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban Jangka Panjang Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Papua Barat per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Kewajiban Konsesi Jasa Rp0

C.6.1. Kewajiban Konsesi Jasa

Kewajiban Konsesi Jasa per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan kewajiban yang timbul dari dampak pengakuan aset konsesi jasa yang berasal dari mitra (badan usaha) sesuai dengan perjanjian konsesi jasa antara entitas pemerintah pusat dengan mitra (badan usaha).

Tabel C.6.1.

Rincian Konsesi Jasa TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	2023	2022
Jumlah	0	0

Ekuitas

Rp0

C.7. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Perpajakan

Pendapatan
Perpajakan
Rp0

Jumlah Pendapatan Perpajakan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Perpajakan
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Jumlah	0	0	0,00

Pendapatan
PNBP Rp0

D.2 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Jumlah	0	0	0,00

Pendapatan
Hibah Rp0

D.3 Pendapatan Hibah

Jumlah Pendapatan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Hibah
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Jumlah	0	0	0,00

Beban
Pegawai Rp0

D.4 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil

(PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Jumlah Beban	0	0	0,00

Beban
Persediaan Rp0

D.5 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Jumlah Beban	0	0	0,00

Beban Barang
dan Jasa
Rp439.835.159

D.6 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp439.835.159 dan Rp244.203.000. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban LAIN-LAIN berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Penurunan Beban Barang dan Jasa terjadi karena adanya penghematan atas beban-beban operasional perkantoran, penurunan pengiriman surat karena sudah disampaikan secara *online*, penurunan beban sewa yang disebabkan adanya pembelian aset sehingga tidak dilakukan penyewaan. Walaupun sebagian besar beban barang dan jasa mengalami penurunan, terdapat beban jasa profesi yang meningkat karena disebabkan meningkatnya aktivitas pelayanan dan mengundang praktisi sebagai narasumber atau penceramah pada kegiatan bidang hukum.

Rincian Beban Barang dan Jasa
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Beban Bahan	55.658.000	60.726.000	(8,35)
Beban Honor Output Kegiatan	4.800.000	3.600.000	33,33
Beban Barang Non Operasional Lainnya	3.500.000	172.340.000	(97,97)
Beban Jasa Konsultan	371.377.159	0	0,00
Beban Jasa Profesi	4.500.000	6.300.000	(28,57)
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	1.237.000	(100,00)
Jumlah Beban	439.835.159	244.203.000	80,11

Beban Pemeliharaan Rp0

D.7 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Kenaikan beban pemeliharaan karena adanya pengeluaran untuk mempertahankan performa dan kapasitas atas aset-aset lama serta pengeluaran untuk asuransi atas gedung dan bangunan. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Jumlah Beban	0	0	0,00

Beban Perjalanan Dinas Rp313.215.400

D.8 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp313.215.400 dan Rp193.134.600. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi rapat koordinasi yang meningkat menjelang akhir tahun dan adanya pelatihan dari Kantor Pusat yang perjalanan dinasnya ditanggung sendiri. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Beban Perjalanan Dinas Biasa	298.815.400	163.984.600	82,22
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	14.400.000	12.350.000	16,60
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	16.800.000	(100,00)
Jumlah Beban	313.215.400	193.134.600	62,17

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
Kepada
Masyarakat Rp0*

D.9 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Satker memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat dan pengusaha UMKM berupa bantuan peralatan dan perlengkapan untuk penerapan akuntansi dan pelaporan. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada
Masyarakat
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Jumlah Beban	0	0	0,00

*Beban Bantuan
Sosial Rp0*

D.10 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Peningkatan beban bansos yang diberikan kepada kelompok masyarakat sebagai Bantuan Sosial untuk mendukung program Indonesia Pintar. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Jumlah Beban	0	0	0,00

Beban
Penyusutan
dan Amortisasi
Rp0

D.11 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Jumlah Penyusutan	0	0	0,00
Jumlah Amortisasi	0	0	0,00
Jumlah Beban	0	0	0,00

Beban
Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih Rp0

D.12 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Jumlah Beban	0	0	0,00

Kegiatan Non
Operasional
Rp0

D.13 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Jumlah Beban	0	0	0,00

Pos Luar Biasa **D.12 Pos Luar Biasa**
Nihil

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat pendapatan atau beban dari Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp0

E.1. Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Defisit LO
Rp753.050.559

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah defisit sebesar Rp753.050.559 dan Rp437.337.600. Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Dampak
Kumulatif
Perubahan
Kebijakan
Akuntansi
Rp0

E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi

Transaksi Dampak Kumulatif Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0.

Penyesuaian
Nilai Aset Rp0

E.4.1. Penyesuaian Nilai Aset

Jumlah Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai
Persediaan Rp0

E.4.2. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel E.4.2

Rincian Koreksi Nilai Persediaan TA 2023

No.	Jenis Persediaan	Koreksi
1.	Barang Konsumsi	0
2.	Suku Cadang	0
Jumlah		0

Selisih
Revaluasi Aset
Rp0

E.4.3. Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi Nilai
Aset Non
Revaluasi Rp0

E.4.4. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi adalah sebagai berikut:

Tabel E.4.4

Rincian Koreksi Aset Non Revaluasi TA 2023

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	0
Gedung dan Bangunan	(0)
Jumlah	0

Koreksi LAIN-
LAIN Rp0

E.4.5. Koreksi LAIN-LAIN

Koreksi LAIN-LAIN untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang, dan utang. Rincian Koreksi LAIN-LAIN adalah sebagai berikut:

Tabel E.4.5

Rincian Koreksi LAIN-LAIN TA 2023

Jenis Koreksi	Jumlah
Koreksi Beban	0
Koreksi Pendapatan	0
Koreksi Piutang	0
Koreksi Kewajiban	0
Koreksi Hibah	0

Transaksi Antar
Entitas
Rp753.050.559

E.5. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp753.050.559 dan Rp437.337.600.

Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal K/L, antar K/L, antar BUN, maupun K/L dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Tabel E.5

Transaksi Antar Entitas TA 2023

Jenis Persediaan	Koreksi
Diterima dari Entitas Lain	0
Ditagihkan ke Entitas Lain	763.050.559
Transfer Masuk	0
Transfer Keluar	(10.000.000)
Pengesahan Hibah Langsung	0
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	0
Jumlah	753.050.559

E.5.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN).

Pada periode hingga 31 Desember 2023, DDEL sebesar Rp0 sedangkan DKEL sebesar Rp763.050.559.

E.5.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp0 terdiri dari:

*Tabel E.5.2.
Transfer Masuk TA 2023*

No.	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1.	Peralatan dan Mesin	Kantor Wilayah KUMHAM Pabar 667779	(0)
2.	Persediaan	Biro Hukum	(0)
Jumlah			0

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp10.000.000 dengan rincian sebagai berikut.

*Tabel E.5.2
Transfer Keluar TA 2023*

No.	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1.	Peralatan dan Mesin	Kantor Wilayah KUMHAM Pabar 667779 KE 667772	10.000.000
2.	Persediaan	Biro Hukum	(0)
Jumlah			10.000.000

E.5.3. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung K/L dalam bentuk kas, barang, maupun jasa, sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp0 dari total Rp0 yang diterima sepanjang tahun 2023 dan total Rp0 yang merupakan Hibah Langsung yang Belum Disahkan dari Tahun Anggaran Yang Lalu.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp0.

Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel E.5.3
Pengesahan Hibah Langsung TA 2023

No.	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Pengesahan
1.	UNICEF	Uang	0
2.	Universitas AKA	Barang	0
Total Pengesahan			0
Pengesahan Pengembalian Hibah			0
Jumlah			0

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Per Satker Tahun 2023 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Ekuitas Akhir
Rp0

E.6. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

F.1 Pengungkapan LAINLAIN

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-12.Kp.03.03 Tahun 2022 Tanggal 21 April 2022 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Keputusan Kepala Kantor Wilayah Nomor W.31.682.KU.03.03 Tahun 2023 Tentang Penetapan Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar Dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Papua Barat Tahun Anggaran 2023 Tanggal 30 Desember 2022, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penangggung Jawab Kegiatan/ Pembuat Komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk Menguji Tagihan Kepada Negara Dan Menandatangani SPM, Dan Bendahara Pengeluaran pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Papua Barat pada tanggal 24 Juli 2023 telah dilakukan penggantian Pejabat Pengelola Keuangan.

Semula:

Kuasa Pengguna Anggaran	: Taufiqurrakhman
Pejabat Pembuat Komitmen	: Jonson Siagian
Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM	: Piet Bukorsyom
Bendahara	: Ananias T Lefteuw

Menjadi:

Kuasa Pengguna Anggaran	: Taufiqurrakhman
Pejabat Pembuat Komitmen	: Agung Damarsasongko
Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM	: Piet Bukorsyom
Bendahara	: Daud Imanuel Naa

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : (10) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

WILAYAH/PROVINSI : (3300) PAPUA BARAT

SATUAN KERJA : (667779) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT

Tgl Data : 13/05/24 6:25 AM

Tgl Cetak : 13/05/24 11:20 AM

Halaman : 1

lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	0	0	
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	0	0	0	
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	0	0	0	
Beban Barang dan Jasa	439,835,159	244,203,000	195,632,159	80.11
Beban Pemeliharaan	0	0	0	
Beban Perjalanan Dinas	313,215,400	193,134,600	120,080,800	62.175
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : (10) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

WILAYAH/PROVINSI : (3300) PAPUA BARAT

SATUAN KERJA : (667779) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT

Tgl Data : 13/05/24 6:25 AM

Tgl Cetak : 13/05/24 11:20 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	753,050,559	437,337,600	315,712,959	72.19
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(753,050,559)	(437,337,600)	(315,712,959)	72.19
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(753,050,559)	(437,337,600)	(315,712,959)	72.19
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(753,050,559)	(437,337,600)	(315,712,959)	72.19

Keterangan :

FINAL

MANOKWARI, 13 Mei 2024

Penanggung Jawab UAKPA

KPA



[Handwritten Signature]
BIE BUKORSYOM

96512271996101001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORGANISASI : (10) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
WILAYAH/PROVINSI : (3300) PAPUA BARAT
SATUAN KERJA : (667779) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
PAPUA BARAT

Tgl Data : 13/05/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 13/05/24 11:20 AM
Halaman : 1
lap_lpe_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	0	0	0	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(753,050,559)	(437,337,600)	(315,712,959)	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	753,050,559	437,337,600	315,712,959	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	0	0	0	-
EKUITAS AKHIR	0	0	0	-

Keterangan :
FINAL

MANOKWARI, 13 Mei 2024
Penanggung Jawab UAKPA
KPA



RIYU BUKORSYOM
196512271996101001

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



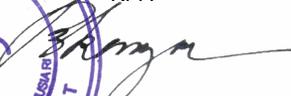
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI 013
ESELON I : BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL 10
SATUAN KERJA : KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT 667779

Tgl Data : 13/05/24 6:25 AM
 Tgl Cetak : 13/05/24 11:20 AM
 Halaman : 2
 lap_lra_face_satker_new

URAIAN	2023				2022			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
a. Dana Perimbangan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Transfer Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Insentif Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Dana Keistimewaan DIY	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	768,741,000	763,050,559	(5,690,441)	99	474,708,000	447,337,600	(27,370,400)	94
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

MANOKWARI, 13 Mei 2024
 Penanggung Jawab UAKPA
 KPA

 RHET BUKORSYOM
 06512271996101001



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
ESELON I : 10
WILAYAH/PROVINSI : null
SATUAN KERJA : 667779
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
PAPUA BARAT
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT

Kode Lap : LRA.B.S.1
 Tanggal : 13/05/24 11:21 AM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lra_bel_sgo

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
01 4841 BDD 52 5212 521211 521219	RUPIAH MURNI Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat BELANJA BARANG Belanja Barang Non Operasional Belanja Bahan Belanja Barang Non Operasional Lainnya	 24,964,000 6,000,000	 26,360,000 3,500,000	 26,360,000 3,500,000	 0 0	 26,360,000 3,500,000	 100 100	 0 0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	30,964,000	29,860,000	29,860,000	0	29,860,000	100	0
5221 522151 522192	Belanja Jasa Belanja Jasa Profesi Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	 900,000 436,000	 2,700,000 0	 2,700,000 0	 0 0	 2,700,000 0	 100 0	 0 0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	1,336,000	2,700,000	2,700,000	0	2,700,000	100	0
5241 524111 524113	Belanja Perjalanan Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	 57,640,000 9,150,000	 60,680,000 5,850,000	 60,550,800 5,850,000	 0 0	 60,550,800 5,850,000	 99.79 100	 129,200 0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	66,790,000	66,530,000	66,400,800	0	66,400,800	99.81	129,200
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	99,090,000	99,090,000	98,960,800	0	98,960,800	99.87	129,200
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4841.BDD	99,090,000	99,090,000	98,960,800	0	98,960,800	99.87	129,200
BIC 52 5212 521211 521213	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga BELANJA BARANG Belanja Barang Non Operasional Belanja Bahan Belanja Honor Output Kegiatan	 14,700,000 3,600,000	 13,856,000 3,600,000	 13,856,000 3,600,000	 0 0	 13,856,000 3,600,000	 100 100	 0 0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	18,300,000	17,456,000	17,456,000	0	17,456,000	100	0
5221 522151 522192	Belanja Jasa Belanja Jasa Profesi Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	 0 436,000	 900,000 0	 900,000 0	 0 0	 900,000 0	 100 0	 0 0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	436,000	900,000	900,000	0	900,000	100	0
5241 524111 524113	Belanja Perjalanan Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	 49,040,000 1,500,000	 47,170,000 3,750,000	 47,117,000 3,750,000	 0 0	 47,117,000 3,750,000	 99.89 100	 53,000 0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	50,540,000	50,920,000	50,867,000	0	50,867,000	99.9	53,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	69,276,000	69,276,000	69,223,000	0	69,223,000	99.92	53,000

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
ESELON I : 10
WILAYAH/PROVINSI : null
SATUAN KERJA : 667779
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
PAPUA BARAT
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 13/05/24 11:21 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_sgo

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4841.BIC	69,276,000	69,276,000	69,223,000	0	69,223,000	99.923	53,000
BMA 52	null BELANJA BARANG							
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	20,775,000	4,819,000	4,819,000	0	4,819,000	100	0
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	6,000,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	26,775,000	4,819,000	4,819,000	0	4,819,000	100	0
5221	Belanja Jasa							
522151	Belanja Jasa Profesi	900,000	900,000	900,000	0	900,000	100	0
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	654,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	1,554,000	900,000	900,000	0	900,000	100	0
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	45,800,000	69,010,000	68,120,900	0	68,120,900	98.71	889,100
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5,400,000	4,800,000	4,800,000	0	4,800,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	51,200,000	73,810,000	72,920,900	0	72,920,900	98.8	889,100
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	79,529,000	79,529,000	78,639,900	0	78,639,900	98.88	889,100
53	BELANJA MODAL							
5361	Belanja Modal Lainnya							
536111	Belanja Modal Lainnya	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	100	0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	100	0
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4841.BMA	89,529,000	89,529,000	88,639,900	0	88,639,900	99.007	889,100
QBA 52	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan BELANJA BARANG							
5221	Belanja Jasa							
522131	Belanja Jasa Konsultan	360,000,000	341,000,000	340,000,000	0	340,000,000	99.71	1,000,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	360,000,000	341,000,000	340,000,000	0	340,000,000	99.71	1,000,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	360,000,000	341,000,000	340,000,000	0	340,000,000	99.71	1,000,000
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4841.QBA	360,000,000	341,000,000	340,000,000	0	340,000,000	99.707	1,000,000
QBC 52	Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat BELANJA BARANG							
5221	Belanja Jasa							

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
ESELON I : 10
WILAYAH/PROVINSI : null
SATUAN KERJA : 667779
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
PAPUA BARAT
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 13/05/24 11:21 AM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_sgo

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
522131	Belanja Jasa Konsultansi	53,350,000	34,863,000	31,377,159	0	31,377,159	90	3,485,841
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	53,350,000	34,863,000	31,377,159	0	31,377,159	90	3,485,841
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	53,350,000	34,863,000	31,377,159	0	31,377,159	90	3,485,841
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4841.QBC	53,350,000	34,863,000	31,377,159	0	31,377,159	90.001	3,485,841
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN4841	671,245,000	633,758,000	628,200,859	0	628,200,859	99.12	5,557,141
5256 ABD 52	Penyelenggaraan Fasilitas Perencanaan, Pemantauan dan Kebijakan Bidang Hukum dan HAM BELANJA BARANG							
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	11,320,000	3,490,000	3,490,000	0	3,490,000	100	0
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	12,520,000	4,690,000	4,690,000	0	4,690,000	100	0
5221 522151	Belanja Jasa Belanja Jasa Profesi	2,700,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	2,700,000	0	0	0	0		0
5241 524111 524113	Belanja Perjalanan Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11,740,000 2,400,000	24,670,000 0	24,588,200 0	0 0	24,588,200 0	99.67 0	81,800 0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	14,140,000	24,670,000	24,588,200	0	24,588,200	99.67	81,800
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	29,360,000	29,360,000	29,278,200	0	29,278,200	99.72	81,800
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 5256.ABD	29,360,000	29,360,000	29,278,200	0	29,278,200	99.721	81,800
BDB 52	null BELANJA BARANG							
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	14,763,000	7,133,000	7,133,000	0	7,133,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	14,763,000	7,133,000	7,133,000	0	7,133,000	100	0
5221 522151	Belanja Jasa Belanja Jasa Profesi	1,800,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	1,800,000	0	0	0	0		0
5241 524111 524113	Belanja Perjalanan Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	83,660,000 5,400,000	98,490,000 0	98,438,500 0	0 0	98,438,500 0	99.95 0	51,500 0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
ESELON I : 10
WILAYAH/PROVINSI : null
SATUAN KERJA : 667779
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
PAPUA BARAT
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT

Kode Lap : LRA.B.S.1
 Tanggal : 13/05/24 11:21 AM
 Halaman : 4
 Prg ID : lap_lra_bel_sgo

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	89,060,000	98,490,000	98,438,500	0	98,438,500	99.95	51,500
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	105,623,000	105,623,000	105,571,500	0	105,571,500	99.95	51,500
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 5256.BDB	105,623,000	105,623,000	105,571,500	0	105,571,500	99.951	51,500
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN5256	134,983,000	134,983,000	134,849,700	0	134,849,700	99.9	133,300
	JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 01	806,228,000	768,741,000	763,050,559	0	763,050,559	99.26	5,690,441
	JUMLAH BELANJA	806,228,000	768,741,000	763,050,559	0	763,050,559	99.26	5,690,441

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : (10) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

WILAYAH/PROVINSI : (3300) PAPUA BARAT

**SATUAN KERJA : (667779) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
PAPUA BARAT**

Tgl Data : 13/05/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 13/05/24 11:21 AM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	0	0	0	
-------------------------------------	----------	----------	----------	--

Keterangan :

FINAL

MANOKWARI, 13 Mei 2024

Penanggung Jawab UAKPA

KPA



PIET BUKORSYOM

196512271996101001

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 1 JANUARI 2023 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
UNIT ORGANISASI : 10
WILAYAH/PROVINSI : 3300
SATUAN KERJA : 667779

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
PAPUA BARAT
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT

Tgl. Cetak 13/05/2024 11:23 AM
lap_neraca_percobaan_sawal_akrua_satker --rekon17

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
 PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : (10) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

WILAYAH/PROVINSI : (3300) PAPUA BARAT

SATUAN KERJA : (667779) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
 PAPUA BARAT

Tgl Data : 13/05/24 6:25 AM

Tgl Cetak : 13/05/24 11:21 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	763,050,559
0.0	313211	Transfer Keluar	10,000,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	55,658,000	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	4,800,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	3,500,000	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	371,377,159	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	4,500,000	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	298,815,400	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	14,400,000	0
JUMLAH			763,050,559	763,050,559

Keterangan :

FINAL

MANOKWARI, 13 Mei 2024

Penanggung Jawab UAKPA

KPA



RIET BUKORSYOM

96512271996101001

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : (10) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

WILAYAH/PROVINSI : (3300) PAPUA BARAT

SATUAN KERJA : (667779) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
PAPUA BARAT

Tgl Data : 13/05/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 13/05/24 11:21 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	763,050,559
3.0	521211	Belanja Bahan	55,658,000	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	4,800,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	3,500,000	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	371,377,159	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	4,500,000	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	298,815,400	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	14,400,000	0
3.0	536111	Belanja Modal Lainnya	10,000,000	0
JUMLAH			763,050,559	763,050,559

Keterangan :

FINAL

MANOKWARI, 13 Mei 2024

Penanggung Jawab UAKPA

KPA



PIET BUKORSYOM

196512271996101001